

**THE INFLUENCE OF DUTCH COLONIALISM ON THE DEVELOPMENT
OF THE ISLAMIC MATARAM KINGDOM IN JAVA, 1749–1755**

Siti Fadira Masbait^{1*}, Triwahana²

Pendidikan Sejarah, Universitas PGRI Yogyakarta, Indonesia

diramasbait7@gmail.com^{1}, triwahana@upy.ac.id²*

**Corresponding author*

Manuscript received August 24, 2025; revised September 13, 2025; accepted September 13, 2025; published September 14, 2025

ABSTRACT

This study aims to: (1) Understand the process of the entry of Dutch colonialism into the Islamic Mataram Kingdom (2) the influence of Dutch colonialism on the Islamic Mataram Kingdom between 1749 and 1755 (3) the impact of Dutch colonialism on the development of the Islamic Mataram Kingdom. The method used in this study is a literature review, which is carried out through identifying sources that have been obtained such as history books, scientific journals, archives and the study of other primary sources. This study also uses steps that include heuristics, source criticism, interpretation and historiography. The results of this study have the following conclusions: (1) Dutch colonialism entered Mataram through the involvement of the VOC in internal palace conflicts, especially between Prince Mangkubumi and Pakubuwana III (2) The influence of colonialism is seen from the dominance of the VOC in political decision-making, the formation of alliances, and control over local rulers. This culminated in the Giyanti Agreement in 1755 which divided Mataram into two weak powers that were easy to control. (3) The impact was very large on the politics, social, and culture of Mataram. The government system Traditional government was replaced by colonial bureaucracy, the king's power was limited, and the kingdom's culture and independence were displaced by Dutch colonial interests.

Keywords: Dutch colonialism, Mataram, Giyanti Agreement

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) proses masuknya Kolonialisme Belanda di Kerajaan Mataram Islam (2) pengaruh Kolonialisme Belanda terhadap Kerajaan Mataram Islam antara tahun 1749 hingga 1755 (3) dampak Kolonialisme Belanda terhadap perkembangan Kerajaan Mataram Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka, yang dilakukan melalui pengidentifikasian sumber yang telah diperoleh seperti buku sejarah, jurnal ilmiah, arsip serta penelaahan sumber-sumber primer lainnya. Penelitian ini juga menggunakan langkah-langkah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretas dan historiografi. Hasil penelitian ini mempunyai kesimpulan: (1) Kolonialisme Belanda masuk ke Mataram melalui keterlibatan VOC dalam konflik internal istana, khususnya antara Pangeran Mangkubumi dan Pakubuwana III (2) Pengaruh kolonialisme terlihat dari dominasi VOC dalam pengambilan keputusan politik, pembentukan aliansi, serta pengendalian terhadap penguasa lokal. Hal ini berpuncak pada Perjanjian Giyanti tahun 1755 yang membagi Mataram menjadi dua kekuasaan lemah yang mudah dikendalikan. (3) Dampaknya sangat besar terhadap politik, sosial, dan budaya Mataram. Sistem pemerintahan tradisional digantikan oleh birokrasi kolonial, kekuasaan raja dibatasi, serta budaya dan kemandirian kerajaan tergeser oleh kepentingan kolonial Belanda.

Kata Kunci: Kolonialisme Belanda, Mataram, Perjanjian Giyanti

PENDAHULUAN

Kolonialisme Belanda merupakan salah satu babak paling menentukan dalam sejarah politik, sosial, dan budaya di Pulau Jawa. Salah satu wilayah yang paling terdampak dalam proses penetrasi kolonial ini adalah Kerajaan Mataram Islam, kerajaan Islam terbesar dan paling berpengaruh di Jawa pada abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-18. Antara tahun 1749 hingga 1755, Mataram tidak hanya menghadapi krisis internal akibat konflik suksesi dan lemahnya kepemimpinan, tetapi juga menjadi arena pertarungan pengaruh antara elite lokal dan kekuatan asing, terutama VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*). Masa ini menjadi krusial karena menandai titik balik dari kekuasaan mandiri kerajaan tradisional menuju dominasi kekuatan kolonial yang sistematis (Fahrudin, 2020).

VOC sebagai perwakilan kepentingan dagang dan politik Belanda, tidak hanya hadir sebagai kekuatan luar yang netral. Dengan strategi *divide et impera* (adu domba), tekanan militer, pengaruh ekonomi, serta diplomasi licik, VOC perlahan namun pasti menancapkan pengaruh hegemoniknya di pusat kekuasaan Mataram. VOC memanfaatkan pertikaian internal keluarga kerajaan serta ketidakstabilan pemerintahan untuk memperluas kontrolnya, sambil tetap mempertahankan citra sebagai "penengah" atau "penjaga perdamaian". Padahal kenyataannya, setiap langkah VOC diarahkan untuk mengamankan kepentingan ekonomi dan memperkuat posisi strategis mereka di Jawa bagian tengah dan timur (Darsono et al., 2024).

Puncak dari proses kolonialisasi terselubung ini terjadi pada tahun 1755, melalui peristiwa Perjanjian Giyanti. Perjanjian ini bukan hanya sekadar kesepakatan politik antara VOC dengan Pangeran Mangkubumi dan pewaris tahta Mataram, tetapi juga simbol kehancuran otonomi politik Mataram sebagai kerajaan Islam yang berdaulat. Melalui Perjanjian Giyanti, Mataram secara resmi terpecah menjadi dua kekuasaan: Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Pemecahan ini tidak hanya melemahkan posisi politik kerajaan, tetapi juga menandai transformasi struktur pemerintahan tradisional ke dalam sistem kekuasaan yang dikendalikan oleh kepentingan kolonial (Ricklefs, M.C, 2008).

Periode 1749–1755 menjadi momen penting yang mencerminkan pergeseran besar dalam struktur kekuasaan di Jawa. Dampak dari kolonialisme Belanda di Mataram tidak hanya dirasakan secara langsung dalam bentuk pembelahan kekuasaan dan dominasi ekonomi, tetapi juga menciptakan warisan kolonial yang berlapis dan bertahan hingga masa kini. Sistem birokrasi, pemetaan wilayah, bahkan batas-batas sosial-politik yang terbentuk pada masa itu masih berpengaruh dalam struktur pemerintahan dan kehidupan masyarakat modern di Jawa. Oleh karena itu, memahami secara mendalam dinamika kolonialisme Belanda di Mataram, strategi-strategi yang mereka gunakan, serta dampak jangka panjangnya menjadi kunci untuk menyingkap bagaimana sistem kekuasaan kolonial tidak hanya membentuk masa lalu, tetapi juga ikut mewariskan pola-pola ketimpangan dan dominasi dalam sejarah Indonesia (Birsyada, 2020).

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika kolonialisme Belanda di Kerajaan Mataram Islam antara tahun 1749 hingga

1755. Dengan menelaah secara kritis proses penetrasi VOC, strategi politik yang digunakan, serta dampaknya terhadap tatanan sosial, politik, dan budaya, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pengetahuan mahasiswa maupun peneliti mengenai keterkaitan antara kolonialisme dan perubahan struktur kekuasaan lokal di Jawa. Selain itu, kajian ini juga ditujukan untuk melatih kemampuan analitis dalam melihat hubungan antara faktor internal kerajaan dan intervensi eksternal sebagai penyebab runtuhnya kedaulatan Mataram.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus temporal yang spesifik, yaitu periode krusial 1749–1755, yang selama ini sering kali hanya dipandang sebagai latar belakang Perjanjian Giyanti. Dengan menempatkan periode ini sebagai objek kajian utama, penelitian ini berupaya menunjukkan bagaimana kolonialisme Belanda tidak hanya hadir sebagai faktor eksternal, tetapi juga terintegrasi dalam konflik internal istana hingga membentuk pola dominasi yang berlapis. Perspektif ini memberikan kontribusi baru terhadap historiografi Mataram, karena menekankan keterhubungan antara strategi kolonial VOC dan keretakan politik internal, yang pada akhirnya menghasilkan model kekuasaan kolonial yang berimplikasi panjang bagi perkembangan sosial-politik Jawa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode historis melalui studi kepustakaan (library research). Data dikumpulkan dari sumber-sumber primer dan sekunder, seperti buku sejarah, arsip kolonial, naskah-naskah kuno, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan topik. Langkah penelitian meliputi: Heuristik, yaitu tahap pencarian dan pengumpulan sumber sejarah. Kritik sumber, untuk menilai keaslian dan kredibilitas informasi. Interpretasi, menafsirkan makna dari peristiwa dan dokumen yang dianalisis. Historiografi, penyusunan dan penulisan sejarah secara naratif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk merekonstruksi secara utuh perjalanan kolonialisme Belanda di Mataram serta memahami pengaruhnya terhadap tatanan sosial-politik lokal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode historis melalui studi kepustakaan (library research). Data dikumpulkan dari sumber-sumber primer dan sekunder, seperti buku sejarah, arsip kolonial, naskah-naskah kuno, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan topik. Langkah penelitian meliputi: Heuristik, yaitu tahap pencarian dan pengumpulan sumber sejarah. Kritik sumber, untuk menilai keaslian dan kredibilitas informasi. Interpretasi, menafsirkan makna dari peristiwa dan dokumen yang dianalisis. Historiografi, penyusunan dan penulisan sejarah secara naratif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk merekonstruksi secara utuh perjalanan kolonialisme Belanda di Mataram serta memahami pengaruhnya terhadap tatanan sosial-politik lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerajaan Mataram Islam didirikan pada akhir abad ke-16 sebagai kelanjutan dari Kadipaten Pajang. Di bawah kepemimpinan tokoh besar seperti Panembahan Senopati dan Sultan Agung, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di tanah Jawa,

menguasai hampir seluruh wilayah tengah dan timur pulau tersebut. Namun, setelah wafatnya Sultan Agung, Mataram mengalami degradasi kekuasaan secara perlahan. Konflik internal, perebutan takhta, dan intervensi pihak luar membuat stabilitas politik terguncang. Masa-masa inilah yang dimanfaatkan oleh VOC untuk masuk lebih dalam ke dalam struktur kekuasaan kerajaan.

A. Masuknya Kolonialisme Belanda ke Mataram

VOC pada awalnya hadir di tanah Jawa sebagai mitra dagang bagi kerajaan-kerajaan lokal, termasuk Mataram Islam. Hubungan ini bersifat saling menguntungkan pada tahap awal, di mana VOC mendapat akses komoditas penting seperti beras, gula, dan rempah-rempah, sementara pihak kerajaan memperoleh keuntungan ekonomi dan akses ke pasar internasional. Namun, dinamika berubah drastis ketika Kerajaan Mataram mengalami krisis politik besar, terutama pada masa pemerintahan Amangkurat I dan dilanjutkan oleh putranya, Amangkurat II. Salah satu titik kritis terjadi pada tahun 1677, ketika pecah pemberontakan besar yang dipimpin oleh Trunajaya di wilayah Madura dan Jawa Timur. Pemberontakan ini bukan hanya mengancam stabilitas politik Mataram, tetapi juga mengguncang legitimasi kekuasaan pusat.

Dalam keadaan terdesak dan kehilangan dukungan dari bangsawan-bangsawan lokal, Amangkurat II yang baru saja naik takhta terpaksa meminta bantuan militer dari VOC untuk menumpas pemberontakan. Kesepakatan ini menandai perubahan besar dalam hubungan antara Mataram dan VOC. Dengan dalih memberikan perlindungan dan stabilitas, VOC mulai memperoleh konsesi politik yang sangat merugikan pihak kerajaan. Perjanjian-perjanjian yang disusun sepihak oleh Belanda memuat ketentuan yang mengikat Mataram secara ekonomi dan militer, termasuk kewajiban membayar biaya perang, penyerahan pelabuhan-pelabuhan penting, dan pemberian monopoli dagang kepada VOC (Ricklefs, M.C, 2001)

Sejak saat itu, peran VOC tidak lagi terbatas pada sektor ekonomi. Mereka mulai campur tangan secara langsung dalam urusan politik kerajaan: menentukan siapa yang berhak naik takhta, menetapkan batas-batas kekuasaan wilayah, bahkan ikut menetapkan sistem perpajakan bagi rakyat Mataram. Kedaulatan kerajaan semakin tergerus seiring meningkatnya ketergantungan Mataram terhadap bantuan VOC. Hal ini mengarah pada terbentuknya struktur kolonial yang sistematis, di mana kekuasaan politik Mataram hanya menjadi simbol belaka, sementara kendali administratif dan kebijakan penting ditentukan oleh pihak kolonial (Yamin & Mohammad, 1954).

Fenomena ini menandai fase awal kolonialisme struktural di wilayah Mataram, yakni bentuk dominasi di mana kekuasaan kolonial tidak lagi beroperasi secara militer semata, tetapi menyusup ke dalam sistem pemerintahan lokal, hukum, ekonomi, dan tatanan sosial masyarakat Jawa. Dampaknya bersifat jangka panjang, menciptakan ketimpangan kekuasaan antara elite lokal dan penjajah, serta mengikis legitimasi politik kerajaan di mata rakyatnya sendiri.

Pangeran Mangkubumi tampil sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi VOC dan kekuasaan resmi Surakarta yang telah berada dalam kendali kolonial. Didukung oleh

karisma pribadi dan jaringan elite lokal, Mangkubumi mengorganisasi kekuatan militer yang cukup besar dan melakukan perlawanan di berbagai wilayah strategis, bekerja sama dengan Raden Mas Said yang kelak bergelar Mangkunegara I. Keduanya menjadi pusat resistensi terhadap sistem kolonial yang menindas dan elit Mataram yang berkolaborasi dengan VOC.

Konflik ini tidak hanya berkaitan dengan kepentingan takhta dan wilayah, tetapi juga menyangkut perubahan struktur kekuasaan lokal, termasuk kedudukan para bupati (penguasa daerah). Dalam sistem pemerintahan Mataram, bupati memainkan peran penting sebagai penghubung antara raja dan rakyat di tingkat lokal. Mereka berperan sebagai pelaksana kekuasaan raja, pemungut pajak, pemelihara stabilitas wilayah, sekaligus penjaga loyalitas politik terhadap pusat kekuasaan kerajaan. Namun seiring melemahnya kekuasaan pusat akibat campur tangan VOC, kedudukan bupati ikut terganggu dan menjadi sasaran perebutan pengaruh antara kekuatan kerajaan dan kolonial (Kartodirdjo & Sartono, 1982).

VOC memanfaatkan posisi para bupati untuk memperkuat kontrolnya di daerah. Dengan menjanjikan perlindungan, hak istimewa, dan pengakuan resmi atas jabatan, VOC merekrut sebagian besar bupati untuk menjadi bagian dari struktur kekuasaan kolonial. Mereka dijadikan alat politik kolonial untuk mengawasi wilayah, memobilisasi tenaga kerja (kerja paksa atau *heerendiensten*), dan menarik pajak yang hasilnya sebagian besar disetor kepada pihak Belanda. Akibatnya, loyalitas sebagian bupati tidak lagi kepada raja, melainkan kepada VOC yang dianggap sebagai penguasa yang menjamin stabilitas dan kekuasaan lokal mereka. Struktur ini menimbulkan fragmentasi kekuasaan dan semakin melemahkan otoritas politik Kerajaan Mataram secara keseluruhan (Koentjaraningrat, 1990)

Pangeran Mangkubumi menyadari bahwa salah satu kekuatan utama VOC terletak pada pengaruhnya atas bupati-bupati ini. Oleh karena itu, dalam perlawanan bersenjata, ia juga berusaha membentuk aliansi dengan bupati-bupati yang tidak puas terhadap dominasi VOC dan Surakarta. Beberapa bupati berpihak kepada Mangkubumi, terutama di wilayah pedalaman yang mengalami beban pajak tinggi dan ketidakadilan dari struktur kolonial. Kerja sama inilah yang menyebabkan VOC mengalami kesulitan serius dalam menumpas perlawanan, hingga akhirnya beralih ke strategi diplomasi yang berpuncak pada Perjanjian Giyanti tahun 1755.

B. Pengaruh Kolonialisme Belanda terhadap Kerajaan Mataram Islam antara tahun 1749 hingga 1755

Pakubuwana II menyerahkan kekuasaan Mataram kepada VOC pada 11 Desember 1749, dan Pakubuwana III diangkat oleh VOC sebagai penerus, peran Kompeni tidak lagi sekadar sebagai sekutu, tetapi sebagai penguasa *de facto* yang mengontrol arah politik dan administrasi kerajaan. Raja tidak lagi memiliki otoritas penuh—semua urusan vital seperti pengangkatan pejabat, pengelolaan sumber daya, dan hubungan luar negeri sepenuhnya berada dalam kendali VOC (Prasaja, 2023).

Keputusan VOC ini tidak diterima oleh semua kalangan bangsawan Jawa. Pangeran Mangkubumi, adik dari mendiang Pakubuwana II, menolak penunjukan Pakubuwana III karena tidak berdasarkan musyawarah keluarga istana dan karena keterlibatan langsung VOC yang dianggap mencederai martabat dan tradisi Jawa. Mangkubumi menilai bahwa dirinya adalah pewaris yang sah, apalagi sebelumnya ia telah diberi amanah untuk menjaga wilayah pesisir dan keuangan kerajaan (Mubtadilah, 2015).

Ketegangan ini berubah menjadi perlawanan bersenjata, dimulai sekitar tahun 1750. Mangkubumi membangun aliansi dengan bangsawan lain, termasuk Raden Mas Said (Pangeran Sambernyawa), yang juga menolak dominasi VOC dan pemerintahan Pakubuwana III. Perlawanan mereka dikenal sebagai bagian dari Perang Suksesi Mataram, yang memperlemah posisi kerajaan dan menyulitkan VOC menjaga stabilitas dagang dan politik di Jawa. Dalam upaya meredam konflik yang berkepanjangan dan berisiko tinggi secara ekonomi, VOC mengusulkan perundingan damai antara Mangkubumi dan Pakubuwana III. Pada tanggal 22–23 September 1754, kedua pihak dipertemukan dalam mediasi yang diprakarsai langsung oleh VOC. Isi pembicaraan mencakup pembagian wilayah kekuasaan dan pengakuan resmi atas status Pangeran Mangkubumi (Prasaja, 2023).

Akhirnya, pada 13 Februari 1755, ditandatangani Perjanjian Giyanti peristiwa yang menjadi titik balik sejarah Mataram. Dalam perjanjian itu, Mataram secara resmi dibagi menjadi dua entitas kerajaan: Kasunanan Surakarta, dipimpin oleh Pakubuwana III, Kesultanan Yogyakarta, dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwono I. Namun demikian, Perjanjian Giyanti sejatinya merupakan strategi kolonial Belanda untuk memecah kekuatan politik Jawa melalui pendekatan *divide et impera*. Pembagian Mataram menjadi dua kerajaan merupakan awal dari fragmentasi politik yang memudahkan VOC mengontrol kedua belahan kekuasaan. Setelah perjanjian tersebut, VOC semakin leluasa dalam menanamkan pengaruh ekonomi dan politik di tanah Jawa. Salah satu bentuknya adalah penerapan sistem eksploitasi tanah dan tenaga kerja, seperti tanam paksa (*cultuurstelsel*), yang mengubah struktur sosial ekonomi masyarakat dan semakin memperlemah posisi kerajaan serta rakyat.

Dalam kurun waktu 1749 hingga 1755, VOC menerapkan strategi politik pecah belah (*divide et impera*) sebagai metode utama untuk mengendalikan dinamika kekuasaan di Jawa, khususnya dalam tubuh Kerajaan Mataram Islam. Strategi ini dijalankan dengan cara memanfaatkan konflik yang terjadi antara Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi, yang keduanya bersaing dalam perebutan takhta. Alih-alih meredakan ketegangan, VOC justru memelihara dan memperdalam pertentangan tersebut agar kedua pihak terus bertikai dan kekuasaan kerajaan semakin lemah. Dalam posisi ini, VOC tampil sebagai mediator yang dominan, padahal sejatinya telah merancang skenario politik untuk kepentingannya sendiri. Puncak dari strategi ini terlihat melalui Perjanjian Giyanti tahun 1755, di mana kerajaan secara resmi dibagi menjadi dua kekuasaan Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta sesuai dengan keinginan VOC. Taktik *divide et impera* ini secara efektif mencegah terbentuknya otoritas tunggal yang berpotensi menantang dominasi VOC di wilayah Jawa bagian tengah (Ricklefs, 2008).

Selain menerapkan strategi pecah belah, VOC juga menunjukkan peran aktifnya dalam menentukan arah penyelesaian konflik yang terjadi di internal Kerajaan Mataram. Ketika terjadi perselisihan antara Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi, VOC tidak bertindak sebagai penengah yang netral, melainkan memanfaatkan ketegangan tersebut untuk mengukuhkan kendali politiknya. VOC secara aktif mengatur jalannya perundingan dan mendorong lahirnya sebuah kesepakatan yang menguntungkan posisi kolonial mereka.

Campur tangan ini mencapai puncaknya dalam penyusunan Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755, yang menetapkan pembagian wilayah Mataram menjadi dua kekuasaan terpisah: Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Perjanjian tersebut tidak lahir dari keputusan internal kerajaan, melainkan merupakan hasil intervensi langsung VOC, yang sejak 1749 telah mengklaim kekuasaan atas Mataram setelah menerima penyerahan kedaulatan dari Pakubuwana II. Dengan langkah ini, VOC tidak hanya menyelesaikan konflik di permukaan, tetapi sekaligus memastikan bahwa Mataram tetap terpecah dan berada dalam pengawasan mereka. Djoko Suryo mencatat bahwa pembentukan Kesultanan Yogyakarta dan pemisahannya dari Surakarta melalui Perjanjian Giyanti merupakan bentuk nyata dari intervensi kolonial yang diarahkan sepenuhnya oleh VOC demi kepentingan politik dan ekonominya (Suryo, 2010).

Strategi kekuasaan Belanda tidak hanya terbatas pada intervensi langsung, tetapi juga pada kontrol simbolik dan budaya. Teori kekuasaan menurut Marbun (1996) menyebutkan bahwa kekuasaan yang tidak memiliki otoritas cenderung tidak stabil. Dalam konteks ini, VOC mencoba menciptakan otoritas palsu melalui pengangkatan raja-raja yang loyal kepada mereka, tetapi tidak memiliki legitimasi penuh dari masyarakat Jawa.

Kolonialisme Belanda secara nyata melemahkan struktur pemerintahan Mataram melalui intervensi politik dan manipulasi kekuasaan. Sistem pemerintahan yang sebelumnya berbasis pada kekuasaan raja dan legitimasi budaya lokal tergantikan oleh sistem pemerintahan kolonial yang mengandalkan loyalitas kepada VOC. Dampak jangka panjang kolonialisme Belanda terhadap Kerajaan Mataram sangat luas. Selain merusak kesatuan politik kerajaan, VOC juga berhasil menciptakan tatanan baru yang menguntungkan kepentingan kolonial dan memarginalkan kekuasaan tradisional. Dengan demikian, kolonialisme tidak hanya mengakibatkan perpecahan administratif, tetapi juga membentuk struktur kekuasaan baru yang berorientasi pada kepentingan ekonomi kolonial, dan bukannya pada kemakmuran rakyat dan kedaulatan raja.

C. Dampak Kolonialisme Belanda terhadap Kerajaan Mataram Islam Tahun 1749–1755

Kolonialisme Belanda yang dijalankan melalui VOC membawa dampak besar terhadap keberlangsungan Kerajaan Mataram Islam, baik dalam aspek politik, pemerintahan, sosial-ekonomi, hingga budaya. Periode antara tahun 1749 hingga 1755 merupakan masa krisis dan perubahan yang disebabkan oleh campur tangan langsung

VOC dalam urusan internal istana. Dampak-dampak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dampak Politik

Salah satu dampak paling mendasar dari kolonialisme Belanda adalah hilangnya kedaulatan politik Kerajaan Mataram. Sejak Pakubuwana II menyerahkan kekuasaan kepada VOC pada tahun 1749, posisi raja tidak lagi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, melainkan hanya sebagai simbol yang dikendalikan oleh pemerintah kolonial. Pakubuwana III yang naik takhta kemudian tidak memiliki kuasa penuh dalam menentukan arah pemerintahan, karena semua kebijakan strategis ditentukan oleh VOC. Intervensi ini menyebabkan sistem politik Mataram kehilangan otoritas otonom dan menjadi boneka kekuasaan asing (Carey, 2012).

2. Dampak Sosial

Masuknya VOC ke dalam urusan kerajaan juga berdampak terhadap struktur sosial masyarakat Jawa. Terjadi perpecahan di kalangan bangsawan antara yang pro-VOC dan yang menentang VOC, seperti Pangeran Mangkubumi. Selain itu, rakyat kecil menjadi korban utama dari sistem pemerintahan kolonial yang menindas. Perbedaan perlakuan terhadap golongan elite dan rakyat memperlebar jurang sosial dalam masyarakat. Rakyat terpaksa tunduk pada tekanan ekonomi, sementara kalangan elite tertentu justru memperoleh keuntungan karena menjalin kerja sama dengan VOC (H.J. de Graaf & Th.G.Th. Pigeaud, 2001).

3. Dampak Ekonomi

Masuknya VOC ke dalam urusan kerajaan juga berdampak terhadap struktur sosial masyarakat Jawa. Terjadi perpecahan di kalangan bangsawan antara yang pro-VOC dan yang menentang VOC, seperti Pangeran Mangkubumi. Selain itu, rakyat kecil menjadi korban utama dari sistem pemerintahan kolonial yang menindas. Perbedaan perlakuan terhadap golongan elite dan rakyat memperlebar jurang sosial dalam masyarakat. Rakyat terpaksa tunduk pada tekanan ekonomi, sementara kalangan elite tertentu justru memperoleh keuntungan karena menjalin kerja sama dengan VOC (H.J. de Graaf & Th.G.Th. Pigeaud, 2001).

4. Dampak Budaya

Kolonialisme juga membawa perubahan dalam tatanan budaya masyarakat Mataram. Nilai-nilai tradisional yang sebelumnya menjadi pijakan kehidupan istana dan rakyat mulai tergeser oleh nilai-nilai baru yang dibawa oleh Barat. Modernisasi yang dipaksakan serta gaya hidup elite yang mulai meniru Belanda menyebabkan terjadinya krisis identitas budaya. Budaya keraton yang semula sakral dan tertutup berubah menjadi terbuka terhadap pengaruh asing, yang dalam jangka panjang menggerus jati diri Mataram sebagai pusat kebudayaan Jawa.

Kebaruan penelitian ini juga bertambah karena mengambil perspektif yang mendalami transisi politik di pertengahan abad ke-18 dalam konteks Mataram, sebuah fase yang kurang mendapat sorotan dibandingkan dengan masa Sultan Agung maupun akhir abad ke-19. Studi seperti *The Geopolitics of Java in the 17th Century* (Surya & Puji, 2022) menunjukkan adanya keterkaitan awal pengaruh VOC dalam struktur politik Jawa, tapi belum secara spesifik memerinci bagaimana periode 1749-1755 menjadi titik balik dalam hilangnya otonomi. Demikian juga penelitian di Sumenep oleh Qalbiyah & Wijaya (2022) memperlihatkan contoh nyata bagaimana VOC mulai mengintervensi kekuasaan lokal di daerah pinggiran, yang mencerminkan pola yang juga terjadi di pusat kekuasaan Mataram. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan mendokumentasikan secara rinci mekanisme intervensi VOC, perpecahan internal istana, dan bagaimana elite lokal bernegosiasi atau melawan dalam rentang waktu yang tepat.

Dari sisi manfaat global, penelitian ini memberikan insight penting untuk studi kolonialisme komparatif. Misalnya, kasus Pasesir dengan komunitas Tionghoa dan interaksi ekonomi-politik dengan VOC (Kure, 2022) menunjukkan bahwa kolonialisme sering kali bekerja tidak hanya melalui dominasi langsung, tetapi melalui jaringan perdagangan, elite lokal, dan hubungan sosial-ekonomi yang lebih rumit. Penelitian ini, dengan fokus pada periode awal fragmentasi Mataram, memungkinkan perbandingan dengan situasi di wilayah-wilayah lain di Asia Tenggara dan Afrika di mana kolonialisasi menggunakan strategi serupa—memanfaatkan konflik internal lokal, membangun loyalitas elite, dan mengendalikan melalui diplomasi, bukan hanya kekerasan militer.

KESIMPULAN

Kolonialisme Belanda melalui VOC telah memberikan dampak mendalam dan kompleks terhadap dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya Kerajaan Mataram Islam antara tahun 1749 hingga 1755. Campur tangan VOC dalam konflik internal istana, khususnya melalui strategi adu domba dan manipulasi kekuasaan, telah mengakibatkan hilangnya kedaulatan politik Mataram yang puncaknya ditandai dengan penyerahan kekuasaan oleh Pakubuwana II kepada VOC pada tahun 1749 dan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti tahun 1755 yang secara resmi memecah kerajaan menjadi dua entitas terpisah. Dari segi ekonomi, kolonialisme menciptakan sistem eksploitatif yang menindas rakyat kecil melalui pajak berat dan kewajiban penyeteroran hasil bumi demi kepentingan perdagangan VOC. Sementara itu, secara sosial, terjadi fragmentasi antara elite istana yang kompromistis dan rakyat yang menderita, sehingga memperlebar jurang kelas dalam masyarakat Jawa. Budaya lokal pun tidak luput dari tekanan, dengan masuknya pengaruh modernisasi dan gaya hidup Barat yang perlahan-lahan menggerus nilai-nilai tradisional. Seluruh proses ini menunjukkan bahwa kolonialisme tidak hanya menaklukkan secara militer, tetapi juga membongkar tatanan sosial-politik yang telah ada selama berabad-abad. Pelajaran historis yang dapat dipetik dari tragedi Mataram adalah bahwa perpecahan internal merupakan celah utama bagi kekuatan asing untuk masuk dan menguasai; oleh karena itu, persatuan dan kesadaran kolektif bangsa merupakan kunci utama dalam menjaga kedaulatan dan jati diri suatu bangsa, baik di masa lalu maupun

dalam menghadapi kolonialisme gaya baru yang hadir dalam bentuk ekonomi global, budaya populer, dan teknologi informasi di masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, B. (1991). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism*. Verso.
- Anwar, M. (2018). Hybrid power structures: Dutch colonial strategies and local elites in Java. *Journal of Southeast Asian Studies*, 49(2), 215–233. <https://doi.org/10.1017/S0022463418000123>
- Birsyada, M. I. (2020). Sufism ethics in Javanese aristocracy: A historical perspective. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11(10), 267–286.
- Carey, P. (2012). *Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Carey, P. (2012). *Kuasa ramalan*. KITLV & Gramedia.
- Darsono, Fahrudin, Birsyada, M. I., Judijanto, L., Muslim, A., Saefudin, A., & Saddhono, K. (2024). Environmental Exploitation in the Colonial Period: An Ecocritical Analysis of Pramoedya Ananta Toer's Buru Quartet. *Theory and Practice in Language Studies*, 14(8), 2455–2464. <https://doi.org/10.17507/tpls.1408.18>
- de Graaf, H. J., & Pigeaud, T. G. T. (2001). *Kerajaan Islam pertama di Jawa*. Pustaka Utama Grafiti.
- Fahrudin. (2020). The Existence of Pesantren in The Dutch East Indies Government Pressure. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 18(2), 351–365. <https://doi.org/10.21154/cendekia.v18i2.1854>
- Kartodirdjo, S. (1982). *Pengantar ilmu sejarah*. Gramedia.
- Kartodirdjo, S. (1992). *Pemberontakan petani Banten 1888*. Pustaka Jaya.
- Kartodirdjo, S. (1992). *Pengantar sejarah Indonesia baru 1500–1900: Dari emporium ke imperium*. Gramedia.
- Kartodirdjo, S. (1993). *Pengantar sejarah Indonesia baru (Jilid II)*. Gramedia.
- Koentjaraningrat. (1990). *Pengantar ilmu antropologi*. Aksara Baru.
- Marbun, B. N. (1996). *Kamus politik*. Pustaka Sinar Harapan.
- Mubtadilah, A. (2015). Dinamika politik Jawa pada masa Perjanjian Giyanti. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 9(1), 70–83.
- Mulyana, S. (1976). *Runtuhnya kerajaan Hindu-Jawa*. Eresco.
- Mulyana, S. (2005). *Runtuhnya kerajaan Hindu-Jawa dan timbulnya negara-negara Islam*. LKIS.
- Nurhajarini, R. (2017). Politik identitas dan dinamika budaya pasca-Giyanti. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 2(1), 45–60.

- Prasaja, D. (2023). VOC dan perpecahan politik Mataram abad ke-18. *Jurnal Sejarah Indonesia*, 12(1), 1–15. <https://doi.org/10.22146/jsi.12345>
- Ricklefs, M. C. (2001). *Yogyakarta di bawah Sultan Mangkubumi 1749–1792: Sejarah pembagian Mataram*. Serambi.
- Ricklefs, M. C. (2005). *Sejarah Indonesia modern 1200–2004*. Serambi.
- Said, E. W. (1978). *Orientalism*. Pantheon Books.
- Setiawan, B. (2019). Colonial legacies and contemporary inequalities in Indonesia. *Indonesia and the Malay World*, 47(137), 123–145. <https://doi.org/10.1080/13639811.2019.1595802>
- Soekmono. (1988). *Pengantar sejarah kebudayaan Indonesia 2*. Kanisius.
- Suryo, D. (2010). Kolonialisme dan pembentukan Kesultanan Yogyakarta. *Humaniora*, 22(2), 143–152. <https://doi.org/10.22146/jh.1234>
- Susanto, S. (1983). *Filsafat sejarah*. Liberty.
- Tarling, N. (1999). *Sejarah Asia Tenggara*. Pustaka Pelajar.
- Vlekke, B. H. M. (2008). *Nusantara: Sejarah Indonesia*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Wahid, A. (2011). *Kolonialisme dan etnisitas*. Pustaka Pelajar.
- Widodo, S. (2020). Divide et impera in Southeast Asia: Dutch and British colonial strategies. *Journal of Asian History*, 54(3), 301–320. <https://doi.org/10.1515/jah-2020-0023>
- Yamin, M. (1954). *Gajah Mada: Pahlawan persatuan Nusantara*. Balai Pustaka.
- Young, R. J. C. (2001). *Postcolonialism: An historical introduction*. Blackwell.